

POHON KINERJA



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat *Allah SubhanahuWaTa'ala* atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat terselesaikan.

Perubahan Indikator Kinerja Utama ini disusun kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPKAD yang telah di lakukan dimana terjadi perubahan target kinerja BPKAD itu sendiri sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama ini, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

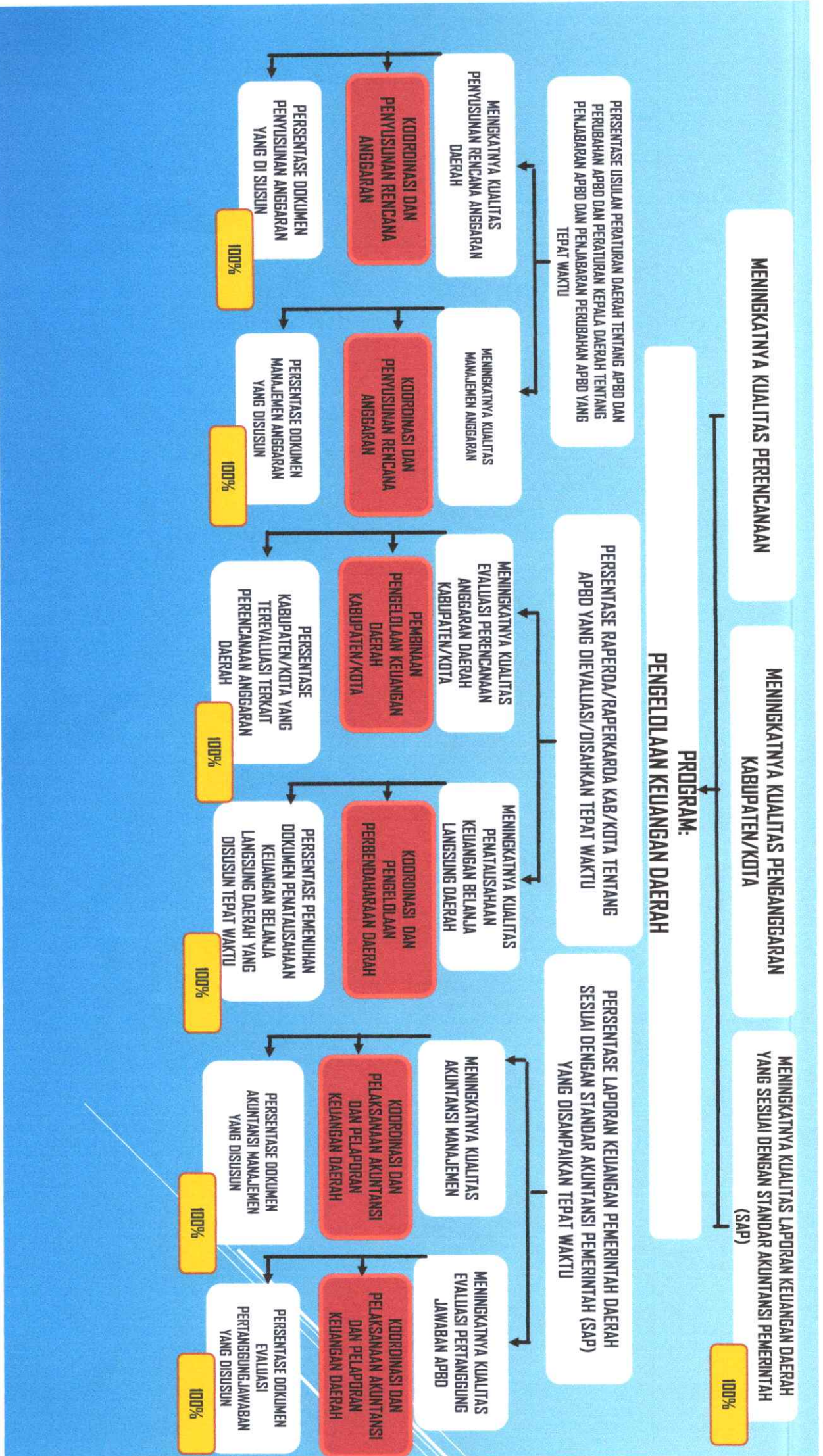
Palu, 3 Juni 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



BAHRAN, SE.,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19650101 199003 1 044



MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN KABUPATEN/KOTA

MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)

100%

PROGRAM: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERSENTASE USULAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERUBAHAN APBD DAN PERUBAHAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG TEPAT WAKTU

PERSENTASE RAPERDA/RAPERKARDA KAB/KOTA TENTANG APBD YANG DIEVALUASI/DISAHKAN TEPAT WAKTU

PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU

MENINGKATKAN KUALITAS PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN

100%

PERSENTASE DOKUMEN PENYUSUNAN ANGGARAN YANG DISUSUN

MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN ANGGARAN

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN

100%

PERSENTASE DOKUMEN MANAJEMEN ANGGARAN YANG DISUSUN

MENINGKATKAN KUALITAS EVALUASI PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

100%

PERSENTASE KUALITAS EVALUASI PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE KUALITAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

MENINGKATKAN KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG DAERAH

KOORDINASI DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH

100%

PERSENTASE KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG DAERAH

PERSENTASE KUALITAS AKUNTANSI MANAJEMEN

MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTANSI MANAJEMEN

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

100%

PERSENTASE KUALITAS AKUNTANSI MANAJEMEN

MENINGKATKAN KUALITAS EVALUASI PERTANGGUNG JAWABAN APBD

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

100%

PERSENTASE DOKUMEN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN YANG DISUSUN

KLASIFIKASI LEVEL KINERJA - BPKAD PROVINSI SULAWESI TENGAH

POHON KINERJA

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS (AKUNTABEL, INOVATIF, EFISIEN, DAN TRANSPARAN)

MENINGKATKAN
INDVASI DAERAH

MENINGKATKAN TINGKAT
PROFESIONALITAS ASN

MENINGKATKAN KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH

MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

MENINGKATNYA
KUALITAS
PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH
SESUAI DENGAN
KETENTUAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

MENINGKATNYA
KUALITAS
PENGANGGARAN
KABUPATEN/KOTA
SESUAI DENGAN
KETENTUAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

MENINGKATNYA
KUALITAS
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH
SESUAI DENGAN
KETENTUAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

MENINGKATNYA
KUALITAS
PENGELOLAAN KAS
DAERAH SESUAI
DENGAN KETENTUAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

MENINGKATNYA
KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH
YANG SESUAI DENGAN
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (SAP)

MENINGKATNYA
KUALITAS
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH SESUAI
KETENTUAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

MENINGKATNYA
KUALITAS TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PENGELOLAAN
KEUANGAN LINGKUP
BPKAD

MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

TERSUSUNNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD

TERSUSUNNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TERBINANYA APARATUR PENGELOLAH PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI

MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN ANGGARAN

TERSUSUNNYA DOKUMEN KUA DAN PPAS

TERSUSUNNYA DOKUMEN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

TERVERIFIKASINYA RKA - SKPD

TERVERIFIKASINYA DPA - SKPD

TERSUSUNNYA DOKUMEN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN HSPK

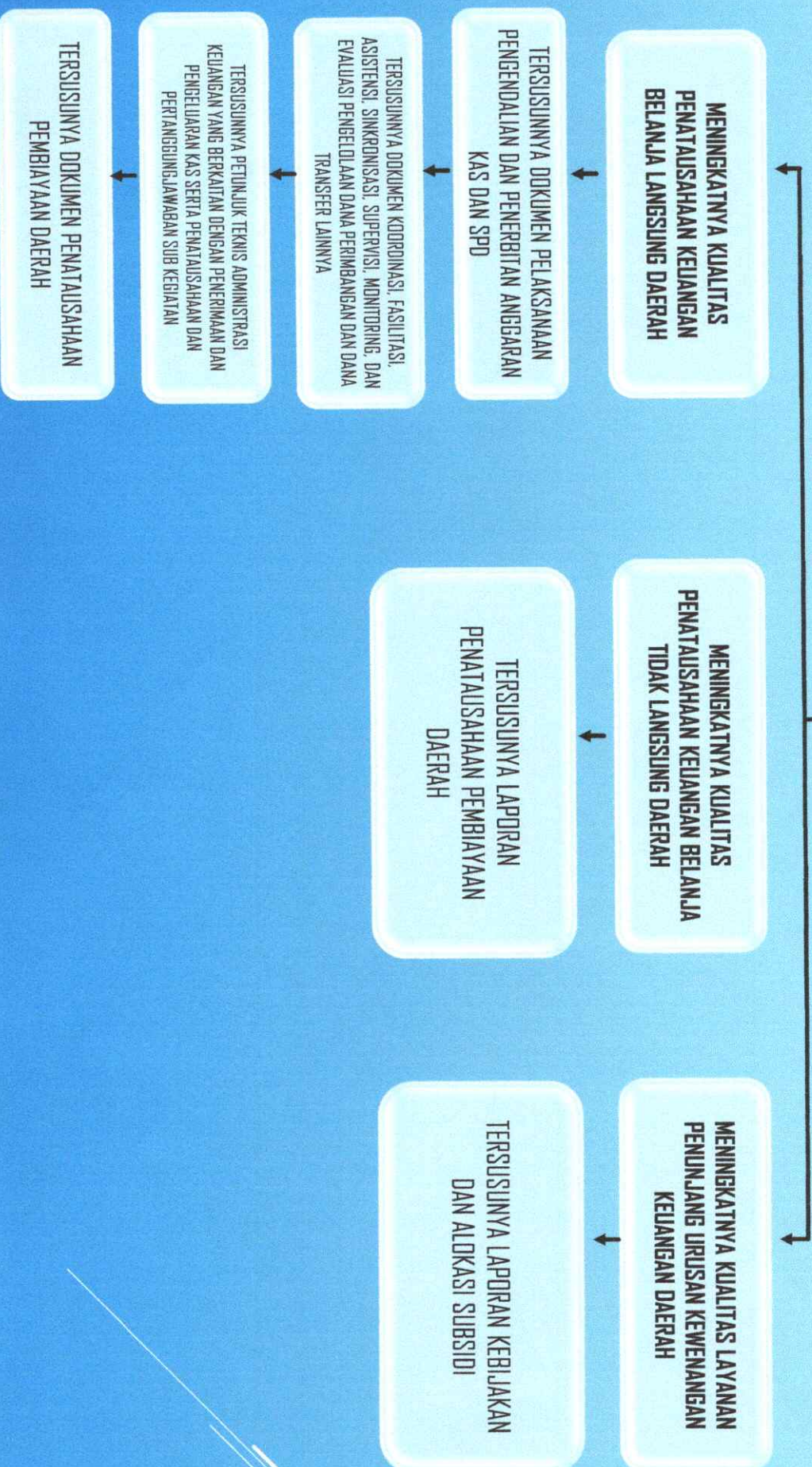
MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENINGKATKAN KUALITAS EVALUASI PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

TERSUSUNNYA LAPORAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN/KOTA

TERSUSUNNYA LAPORAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KAS DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KAS DAERAH

TERSUSUNNYA DOKUMEN DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA (PFK)

TERSUSUNNYA LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH

TERSUSUNNYA LAPORAN KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS

TERSUSUNNYA LAPORAN KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS

TERSUSUNNYA LAPORAN REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT

TERSUSUNNYA DOKUMEN DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA (PFK)

MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

TERSUSUNNYA LAPORAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TERSUSUNNYA DOKUMEN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH

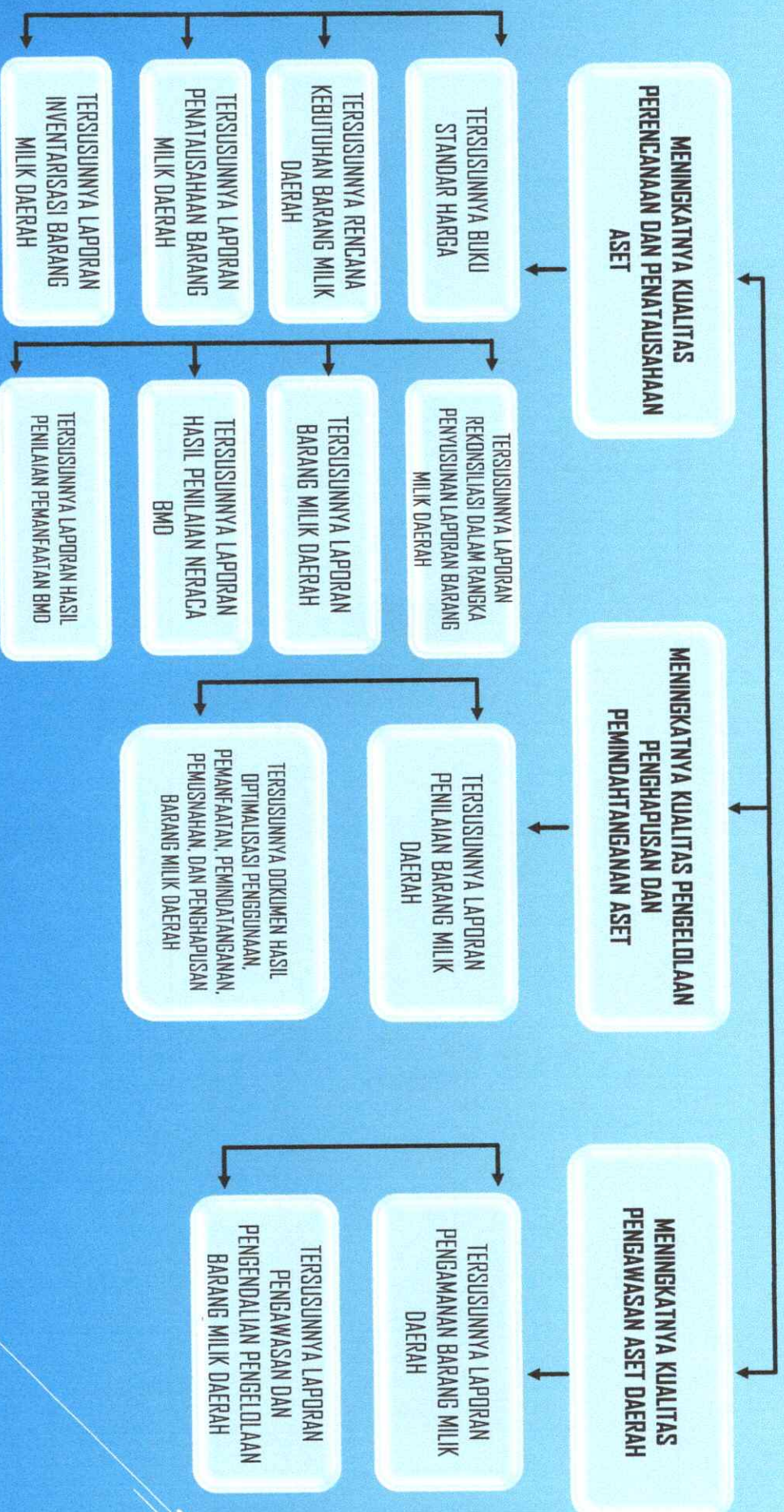
MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTANSI MANAJEMEN

TERSUSUNNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI

MENINGKATKAN KUALITAS EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD

TERSUSUNNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN



MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN LINGKUP BPKAD

MENINGKATKAN
PROFESIONALISME ASN
PERANGKAT DAERAH

TERLATIHNYA PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

TERSOSIALISASINYA PEGAWAI
TENTANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TERBIMBINGNYA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN

TERSUSUNNYA DOKUMEN
PENDATAAN DAN PENGLAHAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

TERSUSUNNYA DOKUMEN
MONITORING, EVALUASI DAN
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

TERPENJUHNYA PAKAIAN
DINAS PEGAWAI BERSERTA
ATRIBUT KELENGKAPAN

MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PERANGKAT DAERAH

TERPENJUHNYA KEBUTUHAN
JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR

TERPENJUHNYA JASA
PELAYANAN UMUM KANTOR

MENINGKATKAN PENERAPAN
SPBE PERANGKAT DAERAH

TERPENJUHNYA JASA
KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK KANTOR

MENINGKATKAN
PENGAWASAN KEARSIPAN
INTERNAL PERANGKAT
DAERAH

TERKELOLANYA SURAT DAN
ARSP

MENINGKATKAN KUALITAS
REFORMASI HUKUM
PERANGKAT DAERAH

TERSINKRONISASINYA KEBLAKKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
INSTANSI

TERSUSUNNYA PAKET
PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR

TERSUSUNNYA PAKET
PERALATAN RUMAH TANGGA

TERSUSUNNYA PAKET
BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN

TERSUSUNNYA PAKET KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN LINGKUP BPKAD

MENINGKATKAN PEMANFAATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG & JASA SECARA ELEKTRONIK PERANGKAT DAERAH

- TERSEDIAKANNYA UNIT KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
- TERSEDIAKANNYA UNIT GEDEUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
- TERSEDIAKANNYA MEBEL KANTOR
- TERSEDIAKANNYA UNIT PERALATAN ELEKTRONIK

MENINGKATKAN KUALITAS BMD PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS
- TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA GEDEUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
- TERPELIHARANYA PERALATAN ELEKTRONIK KANTOR DAN RUMAH DINAS JABATAN

MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN, PENGUKURAN, EVALUASI & PELAPORAN PERANGKAT DAERAH

- TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
- TERSUSUNNYA DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD
- TERSUSUNNYA DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD
- TERSUSUNNYA DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD
- TERSUSUNNYA DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD
- TERSUSUNNYA LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

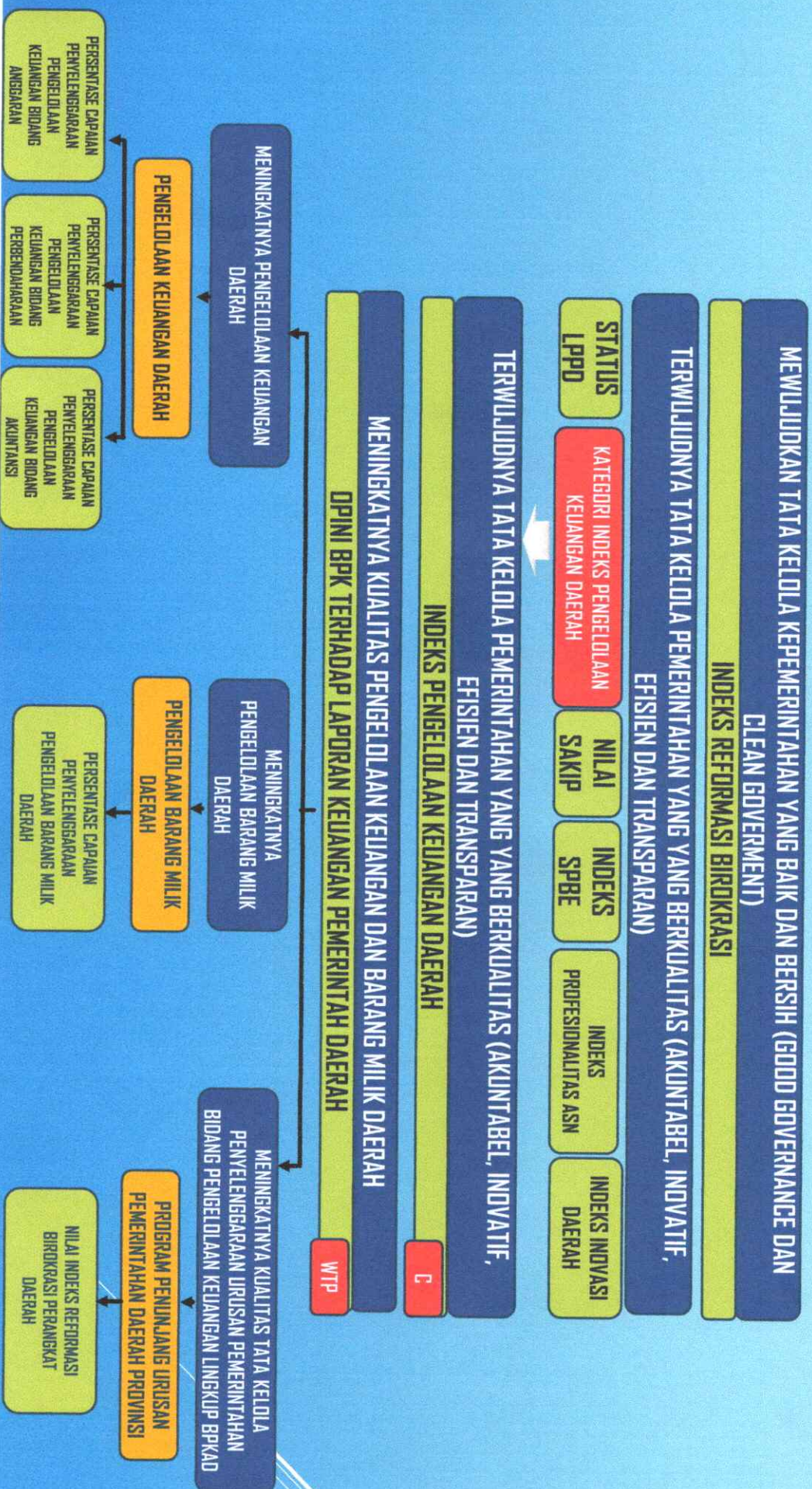
MENINGKATKAN PENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TJHP) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

- TERSUSUNNYA DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN ASN
- TERSUSUNNYA DOKUMEN PEMATAUSAHAN DAN PENJUALAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD
- TERSUSUNNYA DOKUMEN HASIL KORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD
- TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
- TERTERSUSUNNYA DOKUMEN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN
- TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD
- TERSUSUNNYA DOKUMEN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
- TERSUSUNNYA DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN

MENINGKATKAN PENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TJHP) DALAM PENGELOLAAN BMD PERANGKAT DAERAH

- TERSUSUNNYA DOKUMEN RENDANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
- TERSUSUNNYA DOKUMEN PENBAMAMAN BARANG MILIK DAERAH
- TERSUSUNNYA DOKUMEN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

MISI 2:
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI, SUPREMASI HUKUM DAN PENEGAKKAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DAN HAM



MENINGKATKAN KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KAS DAERAH SESUAI

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

100%

PROGRAM: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERSENTASE USULAN PENCAIRAN DARI PERANGKAT DAERAH DENGAN PEREBRITAN SPZD YANG TEPAT WAKTU (JUMLAH SPZD TEPAT WAKTU/JUMLAH SELURUH USULAN SPMK 100%)

PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN KAS DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGARAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

MENINGKATKAN KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAERAH

MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KAS DAERAH

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET

KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU

PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN KAS YANG DISUSUN

PERSENTASE DOKUMEN AKUNTANSI DAN PELAPORAN YANG DISUSUN

PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET YANG DISUSUN

PERSENTASE DOKUMEN PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET YANG DISUSUN

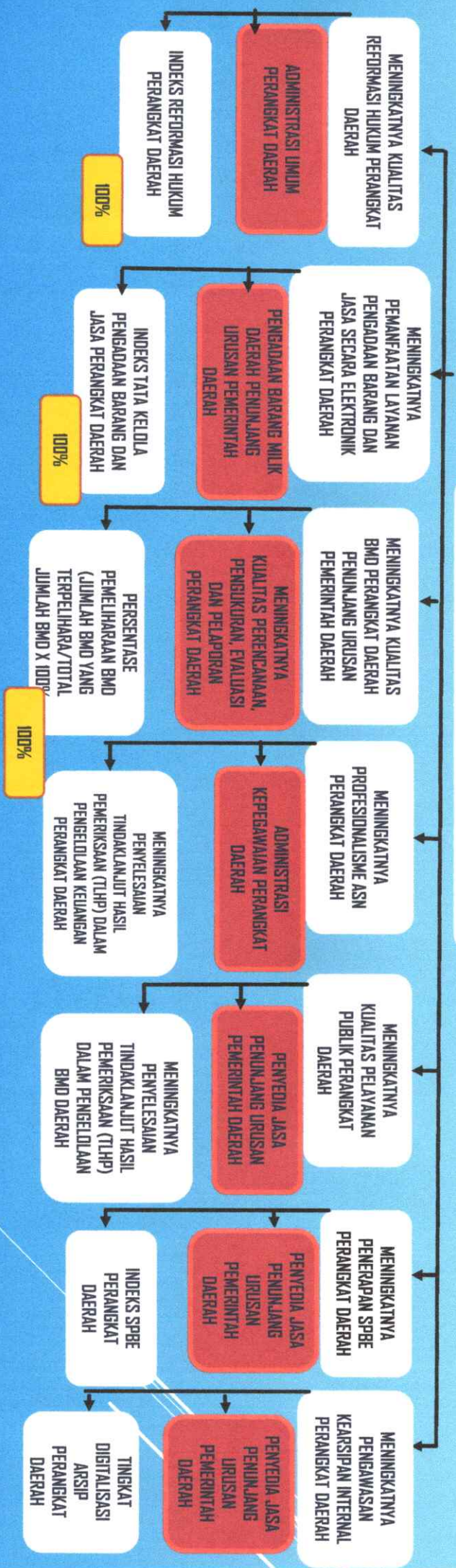
PERSENTASE LAPORAN PENGAWASAN DAERAH YANG DISUSUN

**MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PENGELOLAAN**

100%

**PROGRAM:
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH



**MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGELOLAAN**

100%

PROGRAM:
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

MENINGKATKAN KUALITAS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH

100%

MENINGKATKAN PEMANFAATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PERANGKAT DAERAH

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERANGKAT DAERAH

100%

MENINGKATKAN KUALITAS BMD PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN, PENGUKURAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH

PERSENTASE PEMELIHARAAN BMD (JUMLAH BMD YANG TERPELIHARA/TOTAL JUMLAH BMD X 100%)

100%

PERSENTASE DOKUMEN PENYUSUNAN ANGGARAN YANG DISUSUN

100%

TERSUSUNNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA TENTANG PENLABARAN APBD

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN KEPALA DAERAH TENTANG PENLABARAN APBD

JUMLAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENLABARAN APBD

2 DOK

TERSUSUNNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENLABARAN PERUBAHAN APBD

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN KEPALA DAERAH TENTANG PENLABARAN PERUBAHAN APBD

JUMLAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENLABARAN PERUBAHAN APBD

2 DOK

TERBANYA APARATUR PENGELDAR PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI

PEMBAWAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI

JUMLAH DRANG YANG MENIKUTI PEMBAWAAN PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI

96 DRANG

PERSENTASE DOKUMEN MANAJEMEN ANGGARAN YANG DISUSUN

100%

TERSUSUNNYA DOKUMEN KUA DAN PPAS

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN DERUBAHAN PPAS

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS

2 DOK

TERSUSUNNYA DOKUMEN PERUBAHAN KUA DAN PPAS

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS YANG DISUSUN

2 DOK

TERVERIFIKASINYA RKA - SKPD

KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD

JUMLAH RKA - SKPD YANG DIVERIFIKASI

80 DOK

TERVERIFIKASINYA DPA - SKPD

KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA - SKPD

JUMLAH DPA - SKPD YANG DIVERIFIKASI

80 DOK

TERSUSUNNYA DOKUMEN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN HSPK

KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA - SKPD

JUMLAH DOKUMEN ASB DAN HSPK

1 DOK

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG TEREVALUASI TERKAIT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

100%

TERSUSUNNYA LAPORAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KAB/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KAB/KOTA

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KAB/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KAB/KOTA

JUMLAH LAPORAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KAB/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KAB/KOTA

13 DOK

TERSUSUNNYA LAPORAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KAB/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KAB/KOTA

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KAB/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KAB/KOTA

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KAB/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KAB/KOTA

13 DOK

PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU

100%

TERSUSUNNYA DOKUMEN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD

PENYAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD

JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD

6 DOK

TERSUSUNNYA DOKUMEN KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINERGISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOMPOKAN DAN TRANSFER LAINNYA

KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINERGISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOMPOKAN DAN TRANSFER LAINNYA

JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINERGISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOMPOKAN DAN TRANSFER LAINNYA

8 DOK

TERSUSUNNYA PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SUB KESEHATAN

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SUB KESEHATAN

JUMLAH PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SUB KESEHATAN

2 DOK

TERSUSUNNYA DOKUMEN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH

PEMATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH

JUMLAH DOKUMEN HASIL PEMATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1 DOK

PERSENTASE DOKUMEN AKUNTANSI MANAJEMEN YANG DISUSUN

100%

TERSUSUNNYA DOKUMEN REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LU DAN BEBAN

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LU DAN BEBAN

JUMLAH DOKUMEN HASIL REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LU DAN BEBAN

390 DOK

PERSENTASE DOKUMEN AKUNTANSI MANAJEMEN YANG DISUSUN

100%

TERSUSUNNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI

KODIRUMAH DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI

JUMLAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI

225 DOK

PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN KAS YANG DISUSUN

100%

TERSUSUNNYA DOKUMEN DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PHAK KETIBA (PPK)

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PHAK KETIBA (PPK)

JUMLAH LAPORAN BERTITA BERTITA ACARA REKONSILIASI (BAR) PEMDA KPPM,KPP PRATAMA
12 DOK

TERSUSUNNYA LAPORAN HASIL, KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH

KOORDINASI KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH

JUMLAH BERTITA ACARA REKONSILIASI (BAR) PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
24 LAP

TERSUSUNNYA DOKUMEN HASIL KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS

KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS

JUMLAH DOKUMEN PERJALANAN KERJA SAMA (PKS) PENEMPATAN DANA PEMERINTAH DAERAH
10 DOK

TERSUSUNNYA LAPORAN KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS

KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS

JUMLAH LAPORAN BERTITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN DENGAN BIDANG AKUNTANSI
4 LAP

TERSUSUNNYA LAPORAN REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT

REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT

JUMLAH LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
17 LAP

PERSENTASE DOKUMEN AKUNTANSI DAN PELAPORAN YANG DISUSUN

100%

TERSUSUNNYA LAPORAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

JUMLAH LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
80 LAP

TERSUSUNNYA DOKUMEN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

JUMLAH SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
2 DOK

PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN KAS YANG DISUSUN

100%

SLIDE 15

TERSUSUNNYA LAPORAN
PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN
DAERAH

PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN
DAERAH

JUMLAH LAPORAN REALISASI
PEMBAYARAN GAJI DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

1 LAP

PERSENTASE DOKUMEN AKUNTANSI DAN PELAPORAN YANG DISUSUN

100%

TERSUSUNNYA LAPORAN KEBIJAKAN
DAN ALOKASI SUBSIDI

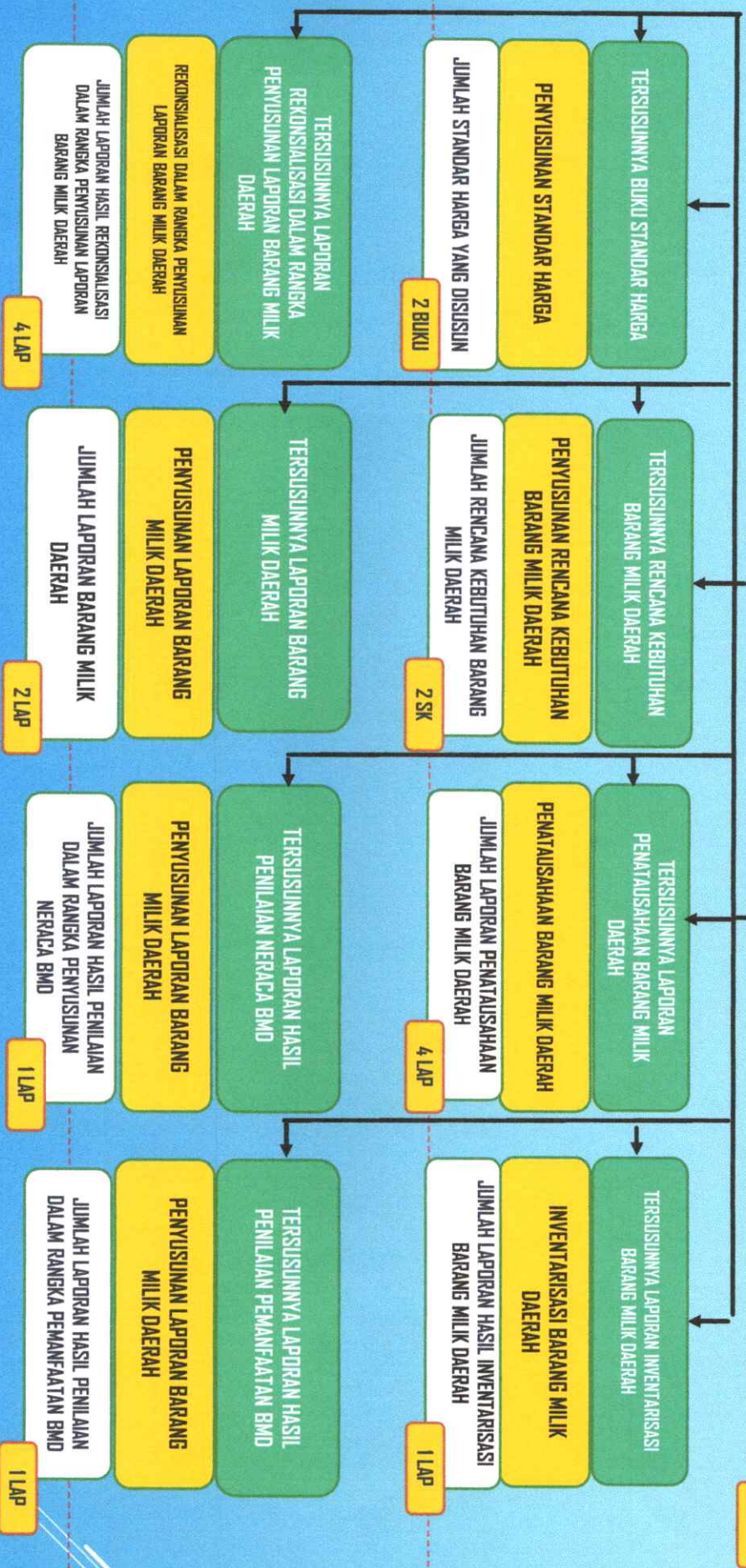
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI
SUBSIDI

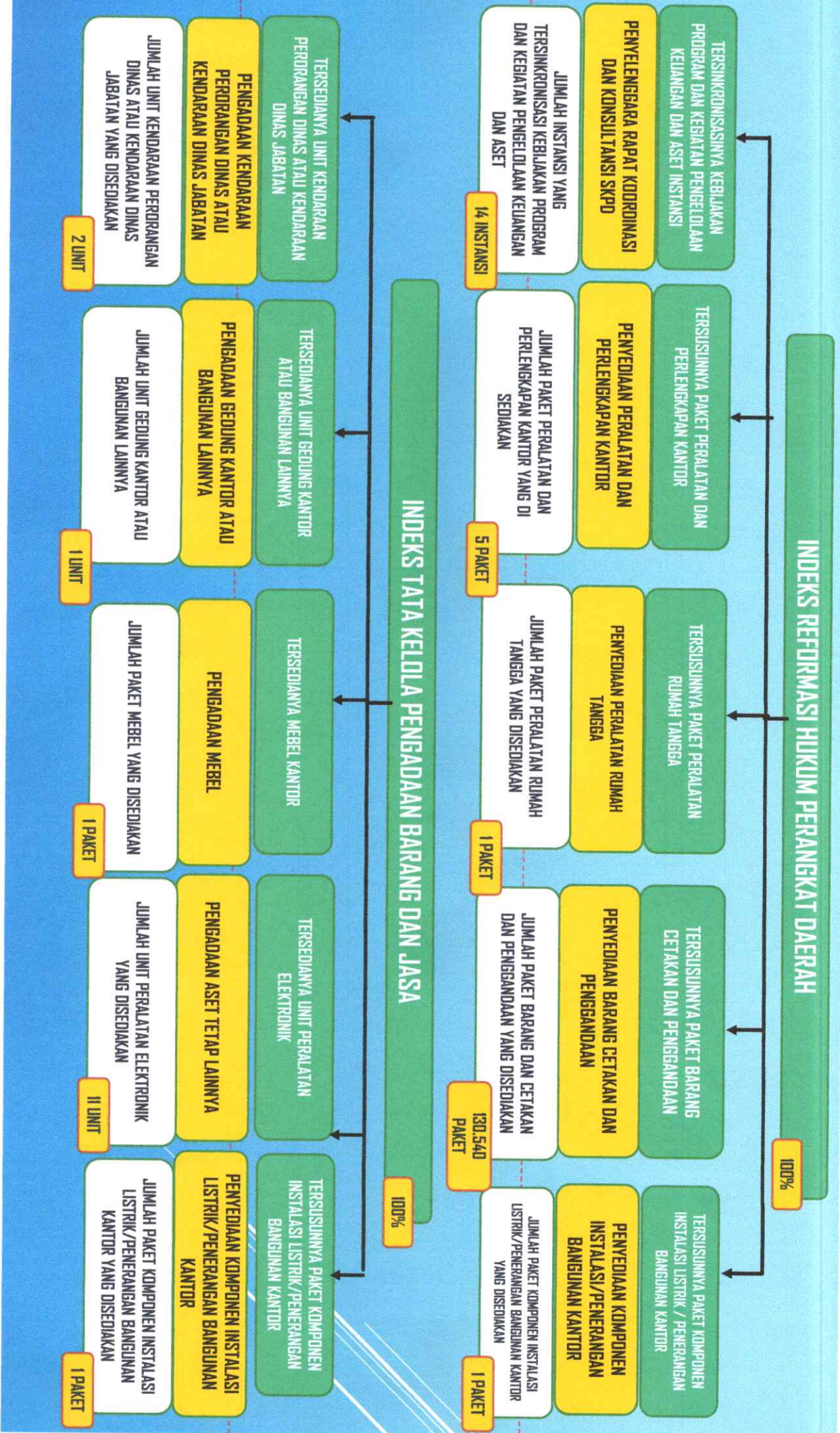
JUMLAH LAPORAN HASIL PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN ALOKASI SUBSIDI

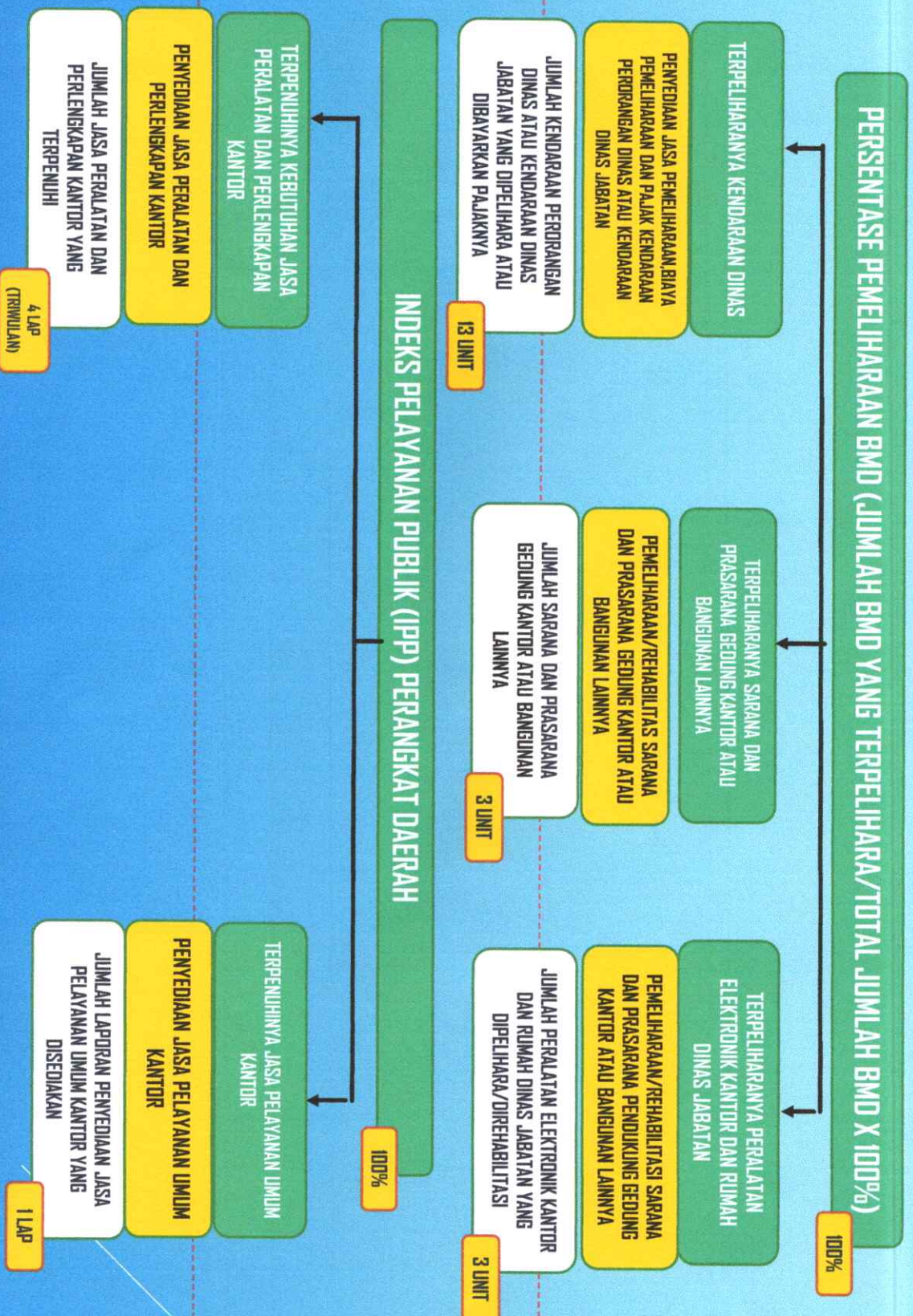
3 LAP

PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET YANG DISUSUN

100%







PERSENTASE PEMELIHARAAN BMD (JUMLAH BMD YANG TERPELIHARA/TOTAL JUMLAH BMD X 100%)

TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PALJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA ATAU DIBAYARKAN PALJAKNYA

13 UNIT

TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

3 UNIT

TERPELIHARANYA PERALATAN ELEKTRONIK KANTOR DAN RUMAH DINAS JABATAN

PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

JUMLAH PERALATAN ELEKTRONIK KANTOR DAN RUMAH DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI

3 UNIT

TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

JUMLAH JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG TERPENUHI

4 LAP (TRIMULAN)

TERPENUHINYA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN

1 LAP

INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH

100%

INDEKS PROFESIONAL APARATUR SIPIL NEGARA PERANGKAT DAERAH

100%

TERLATHINYA PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5 ORANG

TERSOSIALISASINYA PEGAWAI TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SOSIALISAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUMLAH ORANG YANG TERSOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

200 ORANG

TERBIMBINGNYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUMLAH ASN YANG TERBIMBING TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

200 ORANG

TERSUSUNNYA DOKUMEN PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PENDATAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

JUMLAH DOKUMEN PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

1 DOK

TERSUSUNNYA DOKUMEN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

JUMLAH DOKUMEN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

1 DOK

TERPENUHINYA PAKAIAN DINAS PEGAWAI BESERTA ATRIBUT KELENGKAPAN

PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

JUMLAH PEGAWAI YANG TERPENUHI PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

1 DOK

INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH

100%

TERPENUHINYA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KANTOR

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

JUMLAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN

12 LAP

TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH

100%

TERKELOMPOK SURAT DAN ARSIP

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

PERSENTASE PENGELDAAAN SURAT DAN ARSIP

1 LAP

NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

100%

TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

5 DOK

TERSUSUNNYA DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

KOORDINASI DANPENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD

JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

2 DOK

TERSUSUNNYA DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD

JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

2 DOK

TERSUSUNNYA DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD

JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD

1 DOK

TERSUSUNNYA DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD

JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD

1 DOK

TERSUSUNNYA LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

21 LAP/DOK

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) BPK DAN APP DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

100%

